



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.

Jabatan : Kepala Biro Persidangan I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.

Jabatan : Deputy Bidang Persidangan

selaku Deputy Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA

Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP.196804291997031001

PIHAK PERTAMA

Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP.197603091995011001



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERSIDANGAN I**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,492
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₂₂₁)	0,094
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₄₂₁)	-
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K ₂₁₂₁)	0,89
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K ₂₁₂₂)	0,1
5	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU (K ₂₂₂₁)	-
		Nilai tertimbang efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya (K ₂₂₂₂)	0,1

6	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan (K ₂₃₁₁)	0,2
7	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan (K ₂₃₂₁)	0,1
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (K ₂₃₂₂)	0,1

Kegiatan / RO		Anggaran	
A. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI		Rp	45.703.020.000,00
1	001 - RUU Usul DPD RI Tugas Komite I	Rp	11.864.822.000,00
2	004 - RUU Usul DPD RI Tugas Komite III	Rp	10.091.628.000,00
3	008 - RUU Usul DPD RI Tugas Panitia Perancang Undang - Undang	Rp	9.332.054.000,00
4	004 - Rekomendasi Usul Prolegnas	Rp	1.642.145.000,00
5	010 - Konsep RUU	Rp	543.200.000,00
5	013 - Hasil Penyusunan Pandangan/Pendapat Dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite I)	Rp	11.385.992.000,00
6	014 - Hasil penyusunan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu	Rp	279.560.000,00
7	003 - RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Rp	563.619.000,00
	022 - RUU Lainnya hasil pertimbangan DPD RI bidang tugas Komite III	Rp	-
B. Penyelenggaraan fungsi pengawasan		Rp	37.908.850.000,00
1	001 - Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan I	Rp	1.880.000.000,00
2	002-Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I	Rp	639.816.000,00
3	003-Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III	Rp	508.270.000,00
4	002 - Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite	Rp	15.449.052.000,00
5	003 - Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu	Rp	9.580.702.000,00
6	007 - UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI	Rp	1.726.647.000,00

7	010 - Pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Rp	5.579.410.000,00
8	013 - Pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah	Rp	1.227.545.000,00
9	015 - Monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda	Rp	692.526.000,00
10	014 - Diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Rp	624.882.000,00
C. Pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		Rp	9.910.472.000,00
1	001 - Peraturan internal DPD	Rp	409.050.000,00
2	001 - Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional	Rp	9.501.422.000,00

*Catatan: Target dan anggaran yang masih kosong akan berlaku di tahun 2026

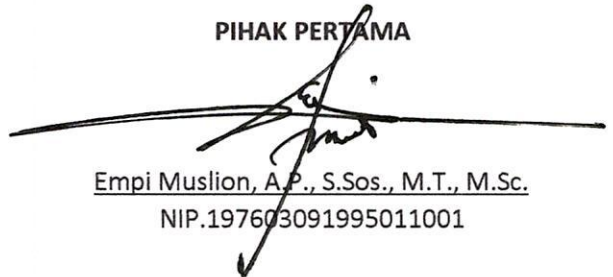
Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP.196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP.197603091995011001